

---

**SELAYANG PANDANG GERAKAN POLITIK & PERUBAHAN SOSIAL (Kajian Sosiologis Perilaku Makna)**

Oleh

**Bambang Amir Alhakim**

**Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Unisda Lamongan, Jawa Timur, Indonesia**

Email: [bambangamir@unisda.ac.id](mailto:bambangamir@unisda.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 11-11-2023

Revised: 17-12-2023

Accepted: 23-12-2023

**Keywords:**

Meaning, Behavior,  
Political Movement,  
Social Change.

**Abstract:** *Political movements are usually initiated by dissatisfaction with a large system in every social function. When this function experiences deviation (distortion), conflict occurs which triggers political movements. With the aim of normalizing towards social change. Conflict is triggered by social inequality (social injustice), as a trigger for a social movement towards social change. In a theoretical perspective, conflict is viewed as an initial indication of a social (political) movement. This social scientific article examines the meaning of behavior in sociological studies from the perspective of the meaning of behavior in the occurrence of political movements aimed at better social change.*

---

**PENDAHULUAN**

Gerakan politik dan perubahan sosial memiliki relasi dan relevansi dalam struktur tindakan politik praktis. Gerakan Politik biasanya diawali oleh ketidakpuasan oleh sebuah sistem besar dalam setiap fungsi sosial. Ketika fungsi ini mengalami penyimpangan (distorsi), maka terjadilah konflik yang memicu adanya gerakan politik. Dengan tujuan menormalisasi ke arah perubahan sosial.

Konflik dipicu oleh adanya ketimpangan sosial (ketidakadilan sosial), sebagai pemicu dari sebuah gerakan sosial menuju perubahan sosial. Dalam perspektif teoritis, konflik dipandang sebagai indikasi awal dari sebuah gerakan sosial (politik).

Kemauan politik (*political will*) itu satu hal, namun pengembangan sebuah sistem politik yang berkeadilan sosial adalah masalah yang termasuk urgen. Bahwa para pemimpin negara-negara ini memiliki komitmen untuk memperjuangkan cita-cita Proklamasi 1945, barangkali tidak perlu diragukan lagi. Tidak seorangpun yang memimpin republik ini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.

Namun yang menjadi masalah, kejelasan arah menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dirasa belum sepenuhnya dirasakan seluruh komponen bangsa, sebagai akibat dari politik yang tidak berkeadilan sosial, hanya berorientasi pada kepentingan penguasa dari pada segenap masyarakatnya. Akibatnya pun fatal, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil. Indikasi ini secara fenomenal dapat dilihat dan dirasakan, antara lain :

1. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, seperti beras sebagai kebutuhan pokok misalnya, harga beras semakin melambung tinggi. Sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat, memicu timbulnya kemiskinan baru. Bahkan banyak bermunculan kemiskinan baru di masyarakat sebagai akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Dan masih banyak fenomena sosial lain sebagai akibat yang bermuara dari penyelenggaraan politik yang tidak berkeadilan sosial. Tiga hal yang menjadi tolok ukur adalah organisasi kekuasaan sangat dominan, kepastian hukum dinafikkan dan rasa keadilan dikesampingkan, sehingga kedaulatan rakyat yang substansial seharusnya dijadikan prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara, malah penuh dengan politisasi di mana paradigma empirik tersebut dikawatirkan dapat melahirkan kekhawatiran sosial.

2. Masalah akan lebih banyak lagi ketika pembentukan partai politik lebih disikapi sebagai alat artikulasi kepentingan para politisi dari pada para pengikutnya. Sebagai akibatnya, setiap penguatan fungsi lebih memberikan keuntungan kepada politisi dan partai politik ketimbang rakyat yang diwakilinya. Pada gilirannya, mekanisme *check and balances* antara cabang kekuasaan legislatif dengan eksekutif lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan partai politik dari pada kepentingan masyarakat sosial secara keseluruhan.
3. Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam arti yang lebih substansial belum terbentuk secara demokratis. Memang kebebasan berbicara, menyatakan pendapat dan berorganisasi telah dibuka lebar-lebar. Namun yang terjadi adalah mobilisasi oleh kekuatan non negara dengan mengeksploitasi isu-isu sensitif di seputar agama, kesukuan. Akibatnya politik komunal dengan pendekatan primordialisme terlihat lebih dominan ketimbang praktik politik yang demokratis.
4. Kecurigaan terhadap peran birokrasi baik sipil maupun militer terus berkembang sejalan dengan tiadanya aturan dan sanksi yang berusaha untuk menghentikannya. Lambatnya aturan perundangan yang diperlukan untuk memperkuat posisi birokrasi, antara lain disebabkan oleh lambatnya atau keengganan para politisi untuk menjalankan fungsi pengawasan ketimbang fungsi yang satu itu. Peran politik kian dominan. Hampir dipastikan uang berada dibalik setiap proses pembuatan keputusan. Makin besar implikasi dari sebuah keputusan, makin besar pula transaksi finansialnya. Mulai dari pemilihan anggota legislatif, eksekutif sampai ke pembuatan aturan perundangan tidak terbebas dari pertimbangan uang. Jangan heran apabila tradisi suap, percaloan, korupsi dan lain sebagainya lebih terlihat kasat mata sekarang ini ketimbang di masa lalu. Realitas riil ini bisa dilihat faktanya di lapangan.

Oleh karena itu, untuk menjaga visi, misi, komitmen dan semangat politik **berkeadilan sosial** demi menjaga legitimasi kekuasaan sangatlah diperlukan untuk menjadi panutan bagi rakyat yang dipimpinnya, sehingga perlu :

1. Dibangun kesadaran politisi dalam berpolitik lebih mengedepankan semangat politik berkeadilan sosial dengan mengutamakan aspirasi rakyat agar sistem politik berjalan sesuai harapan semua komponen bangsa.
2. Dengan sistem politik yang benar dan sehat akan tumbuh semangat berkeadilan sosial dalam bingkai negara Bhinneka Tunggal Ika yang mampu membumikan kesatuan (politik) demi dinamisasi pembangunan.
3. Pengembangan sistem pemerintahan yang menganut *prinsip good governance*, menjadi sebuah prinsip dasar yang diperjuangkan, agar birokrasi lebih melayani kepentingan publik, bukan penguatan pejabat dihadapan rakyatnya.
4. Membuka ruang publik secara lebih adil, sehingga tumbuh kemajemukan ruang bagi peran serta masyarakat, dan pada gilirannya akan memperkuat *civil society yang kredibel*, mandiri serta berwibawa di hadapan rakyatnya.

- 
5. Perlu diciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan keteladanan para pemimpin serta pengembangan hukum yang berorientasi pada keadilan. Keadilan di sini intinya adalah kesamaan kesempatan (*equal opportunities*) baik dalam bidang politik maupun ekonomi sosial.
  6. Peran uang dalam politik memang sebuah keniscayaan. Tapi perlu diakomodasi agar keberadaannya tidak menjadi faktor yang paling menentukan, agar mengurangi berbagai kecurigaan dan ketegangan antar komponen bangsa serta dapat menetralkan dominannya *analisis class* dalam wacana politik berkeadilan sosial seperti : sipil- militer, pengusaha-penguasa, penguasa – rakyat, pusat – daerah, dan sebagainya.
  7. Perlu dikembangkan format baru pembangunan politik berkeadilan sosial bangsa ini meliputi: *check and balances*, pemberdayaan partai politik sebagai *agent of development and political changes*, penguatan birokrasi dan supremasi hukum, peran militer yang profesional dan proporsional, partisipasi masyarakat yang sehat, pers sebagai media pengawas dan sumber informasi, *civil society* yang sesungguhnya, pemimpin yang meneladani. Namun dalam perjalanan kepada semangat berkeadilan sosial tersebut tidaklah mudah, karena :
    1. Perencanaan kepemimpinan dan pembangunan tidak berbasis aspirasi rakyat akan menciptakan krisis konflik sosial dan antipati masyarakat. Contohnya: kebijakan pembangunan yang berasal dari kerakyatan tetapi lebih didorong pressure dari pemberi bantuan (donor). Tidak ada perhatian sama sekali terhadap perencanaan itu sendiri. Seharusnya, di dalam perencanaan, jangan satu lapisan pendudukpun boleh dibiarkan tidak terjamah oleh perubahan (pembangunan). Usaha pemerataan kesejahteraan, percepatan lapangan kerja dan faktor keadilan sosial harus menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan pembangunan, agar kemajuan pembangunan tidak salah urus yang kemudian masyarakat menjadi korbannya.
    2. Yang lebih krusial, pengurangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup banyak, tetapi hasilnya sebagian besar tidak tepat sasaran, bisa jadi disebabkan salah satunya basis data yang kurang akurat atau tidak ter-update secara berkesinambungan mulai dari struktur pemerintahan dari bawah. Disinilah pentingnya perencanaan secara efektif dan matang.
    3. Kemudian, kronisnya virus budaya KKN di segala strata dan bidang. Di mana korupsi juga dapat dilihat pada lapisan bawah. Sifat korupsi-isme merajalela mengancam supremasi moral para penguasa, sampai M. Cholil Bisri, seorang ulama seniman dan seniman yang ulama mengatakan, **"Membangun apa saja tanpa muatan iman, sama dengan menciptakan kekeroposan yang pada akhirnya terciptalah kesia- siaan "**. Dan bukti ucapan ini kemudian terasa sampai sekarang. Sebagai akibatnya, budaya KKN merajalela telah merusak sendi- sendi kehidupan masyarakat sebuah bangsa. Bouthros Ghali mengutarakan bahwa **perubahan global yang tidak sinkron akan menimbulkan ketegangan berbahaya**. Kemudian Mirdal mengatakan **"Korupsi nyata- nyata sangat fatal akibatnya bagimasyarakat**. Di sini mengisyaratkan bahwa segala perubahan (pembangunan) yang di dalamnya tidak ada unsur kompromi sosial bakal mengakibatkan ketimpangan sosial.
    4. Gejala bangunan sosial yang makin keropos karena lemahnya daya guna *social capital* mengakibatkan beragam jenis kebijakan bisa gagal menghasilkan harapan maksimal masyarakat karena tidak bersendikan aspirasi kerakyatan, hanya ambisi kekuasaan yang

berakibat merosotnya kredibilitas kekuasaan. Padahal kemiskinan misalnya, dianggap penyebab paling mendasar berkisar pada persoalan- persoalan struktural seperti: keterbatasan akses berbagai kesempatan ekonomi, kebijakan penguasa yang kurang berpihak pada rakyat kecil, kurang modal dan sebagainya. Persoalan ini diyakini besar pengaruhnya dalam pemiskinan rakyat. Begitu besar dana pembangunan telah dibelanjakan, tetapi tetap saja tidak ada pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ditenggarai penyebab hal tersebut adalah kebijakan- kebijakan yang diimplementasikan senantiasa berbenturan dengan tembok kokoh nilai- nilai sosial, ketiadaan semangat kebersamaan, hilangnya rasa saling mempercayai, keterdesakan nilai- nilai luhur, hilangnya kearifan lokal. Padahal seharusnya, rasa keadilan harus memenuhi segala ruang publik sebagai syarat perekat rasa persatuan (kesatuan) sebuah bangsa. Jangan ambisi penguasa, memaksa air mata rakyat yang dipimpinnya, berakibat memicu letupan gerakan sosial (politik) sebagai *manifestasi distrust*, ketidakpuasan dari sistem politik yang tidak berkeadilan sosial. Jangan sampai terjadi revolusi frontal sebagai apresiasi ketidakpuasan sosial sebagai akibat pressure kekuasaan yang mematikan aspirasi rakyat, lebih- lebih di era semangat reformasi. Talcot Parson mengatakan, "Revolusi terjadi jika ada nilai- nilai dan lingkungan mengalami disinkronisasi".

### **Kajian Teoritis Gerakan Politik Dari Perspektif Konflik Sosial Menuju Perubahan Sosial**

Ralf Dahrendorf merupakan salah satu yang memiliki teori konflik modern yang sangat terkenal semenjak diterbitkannya tulisannya yang berjudul " **Class and class conflict in industrial society** " (1951) yang menyajikan tentang tidak seimbangannya masyarakat modern dan berupaya menciptakan masyarakat di mana konflik antar kelas **diinstitutionalisasikan** dan diaplikasikan dalam lingkup ekonomi. Dahrendorf menolak dikotomi dua sistem kelas Marx, karena itu terlalu sederhana untuk diaplikasikan ke dalam masyarakat pasca kapitalis. Dan karenanya ia menekankan pada kepemilikan property sebagai karakteristik pembeda kelas, sebagai kelas menengah baru. Dalam konsep kekuatan, ia melihat bahwa semua konflik harus melibatkan dua pihak sebagai pola **dikotomi** posisi antara dua pihak yang sama- sama memiliki kekuatan. Di sinilah timbulnya konflik karena benturan kepentingan antara keduanya.

Pernyataan utama dalam analisis Dahrendorf bukanlah fungsionalisme struktural atau marxisme, karena fungsionalisme tidak memperhatikan realitas konflik sosial, sedang marxisme mengabaikan bukti konsensus dan integrasi dalam struktur sosial modern. Sebagai alternatifnya Dahrendorf berupaya " **menarik apa yang bermanfaat dari Marx** " dan menggabungkannya dengan elemen menjanjikan dari fungsionalis strukturalis. Dahrendorf mengusulkan perbaikan dengan pembangunan terhadap masyarakat yang berbeda struktur kelas dan hubungan sistem kekuasaan yang mengalir. Ia berupaya menciptakan masyarakat di mana konflik antar kelas **diinstitutionalisasikan dan diaplikasikan dalam lingkup ekonomi**.

Sehubungan dengan pertentangan terhadap pandangan sebelumnya yang menggambarkan bahwa struktur masyarakat modern itu dalam " **koordinasi fungsional, integrasi dan konsensus** ", maka Dahrendorf mengajak kembali pada reorientasi pemikiran yang mengarah pada problem - problem perubahan, konflik dan tekanan dalam struktur sosial. Sebagaimana para pendahulunya dalam sosiologi barat,

Dahrendorf menemukan hal-hal sebelumnya, ia juga mempercayai terhadap pertimbangannya sendiri dengan menggunakan metode empirik dalam menerima dan menolak teori-teori Marx.

Awal revisinya dari pengujian model dua kelas dari Marx pada sistem kapitalis, Dahrendorf mencoba melengkapi bab terakhirnya Marx dan ia percaya bahwa jika seandainya Marx masih hidup, hal serupa pasti akan dilakukan Marx. Versi Dahrendorf bahwa untuk menunjukkan konsep kelas ala Marx yang telah dirumuskan pada awal 19 itu, ternyata terputus penerapannya pada situasi abad 20. Dahrendorf mencoba menyakinkan bahwa analisa Marx teralalu sempit, yakni hanya membahas tentang kepemilikan legal. Kriteria kelas yang dikemukakan Marx menurut Dahrendorf terbagi menjadi dua yaitu mereka yang memiliki alat produksi dan mereka yang tidak memiliki alat produksi dalam pengertian yang legal dan bukan dalam pengertian struktur otoritas perusahaan. Jadi dengan cara membebaskan definisi kelas yang sempit ini, akan dapat dipergunakan bagi seluruh hubungan-hubungan produksi.

Marx tentu mengacu pada hubungan pemilikan sebagai ekspresi legal dalam hubungan-hubungan produksi. Definisi Marx ini dapat dipahami karena kapitalisme pada awal abad 19, secara jelas para pengusahanya memiliki alat produksi dan sekaligus memiliki otoritas dalam berusaha. Menurut Dahrendorf, sangatlah keliru untuk diartikan Marx gagal dalam memahami bahwa kontrol produksi merupakan kekuatan kunci kekuasaan ekonomi. Demikian pula kesalahan yang sama jika ditafsirkan bahwa Marx menolak tentang alat produksi, di bawah situasi kapitalis, dapat dipisahkan dari pemilikan.

Dahrendorf mencoba memperkuat kasusnya atas dasar penjelasan Marx, seperti dalam bukunya yang ketiga berjudul kapital, yakni tentang perusahaan dengan saham gabungan, di mana pada Marx telah menggambarkan adanya kecenderungan yang kemudian dianggap sebagai pemisahan antara pemilikan dan kontrol. Penjelasan ini menurut Dahrendorf menunjukkan bahwa hubungan produksi sebagai suatu determinan pada formasi kelas yang juga berkaitan dengan otoritas, tetapi hal semacam itu hanya terjadi pada awal di mana hubungan pemilikan itu dipahami dalam pengertian yang sempit yakni hanya dari distribusi kontrol kepemilikan pribadi.

Dengan mengamati perbincangan mengenai Marx secara teliti, memperlihatkan bahwa nampak Dahrendorf telah menyalahkan penjelasan Marx. Dia mengutip Marx tetapi bersamaan itu mengatakan bahwa munculnya perusahaan gabungan telah mewakili adanya perusahaan modal sebagai pemilikan pribadi dalam model produksi kapitalis itu sendiri. Ini berarti dia mengatakan bahwa dengan adanya perusahaan gabungan ini merupakan jalan tengah menuju ke arah masyarakat tanpa kelas sebagaimana yang diinginkan oleh Marx. Melalui analisisnya, Dahrendorf membahas tentang adanya pemisahan pemilikan dan kontrol, serta adanya beberapa perubahan semenjak munculnya masyarakat kapitalis.

### **Struktur Kelas Pada Pasca Kapitalis**

Dahrendorf menolak dikotomi dua sistem kelas model Marx, karena ia terlalu sederhana untuk diaplikasikan dalam masyarakat pasca kapitalisme dan karena ia menekankan pada kepemilikan properti sebagai karakteristik pembeda kelas. Kelas kapitalis di sini mengalami "**pembusukan**" karena munculnya "**perusahaan kerja sama**" (perusahaan gabungan) yang memisahkan kepemilikan tunggal dengan produksi ekonomi sesungguhnya.

Komplikasi penting kedua dalam struktur kelas modern meliputi diversifikasi dalam

kelas pekerja. Dahrendorf mengkritik pandangan Marx dan menyebut bahwa proletariat akan menjadi kumpulan operator mesin yang homogen. Ia mengusulkan pembatasan antara pekerja berdasarkan keahlian, kesempatan kerja dan prestise, yang mana memerlukan personel yang lebih ahli. Hasilnya adalah pluralitas status dan keahlian kelompok yang memiliki minat berbeda pula.

Faktor penting ketiga dalam pluralitas kelas ini meliputi kategori individu yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kelas borjuis ataupun proletar secara pasti, akan tetapi dikategorikan "**kelas menengah baru**". Bagi Dahrendorf, orang-orang ini termasuk juga pekerja kelas putih, melampaui kelas pekerja lama, sedang beberapa diantaranya termasuk birokrat dan eksekutif, telah mengubah posisi kelas kapitalis lama.

Birokrat dilain pihak diharuskan memberikan dukungan kepada kelas Penguasa. Walau banyak diantara mereka mendapat gaji lebih kecil dari pada yang diterima oleh pegawai kantor serta buruh industri, mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang, maka mereka menduduki posisi yang berlawanan dengan posisi kelas buruh. Menurut Dahrendorf, bagi birokrasi, realitas sosial tertinggi adalah karir, setidaknya menurut teori suatu hubungan langsung antara setiap orang dan posisi puncak yang dapat dijelaskan sebagai tempat wewenang tertinggi. Menurutnya, kelirulah mengatakan birokrat sebagai kelas penguasa, tetapi bagaimanapun mereka adalah sebagian dari kelas penguasa dan karena itu orang mengira mereka memainkan peranan di dalam pertentangan industri, sosial dan politik.

Pelapukan buruh dan kapital telah menghasilkan perkembangan sosial yang terjadi sejak masa hidup Marx., tetapi kelas menengah baru lahir dalam keadaan lapuk. Menurut Dahrendorf, tidak pernah ada kelas menengah baru itu, tetapi yang jelas ada pegawai kantor dan birokrat. Menurutnya kemunculan karyawan penerima gaji ini pertama-tama berarti suatu perluasan dari kelas borjuis dan proletariat lama. Birokrat menambah terhadap borjuis, begitu pula pekerja kantor menambah terhadap proletariat. Kedua kelas ini melalui perluasan, bagaimanapun telah menjadi semakin heterogen dan kompleks. Pekerja kantor, serupa dengan buruh industri tak mempunyai kekayaan dan wewenang, namun mereka memperlihatkan ciri-ciri sosial yang sangat berbeda dari pada ciri-ciri sosial yang terdapat dalam kelas buruh yang lama. Begitu pula birokrat jauh berbeda dengan kelas penguasa yang lama, sekalipun mereka sama-sama melaksanakan wewenang. Sangat disangsikan apakah konsep kelas masih dapat diterapkan terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan di dalam masyarakat post kapitalis.

#### **Dahrendorf Dalam Kekuatan Dan Kekuasaan**

Jelas bahwa konsep Dahrendorf berkaitan dengan kelas dan ketidak seimbangan berhubungan dengan pandangannya terhadap kekuatan dan kekuasaan. Ini mengingatkan pada konsep Weber di mana Dahrendorf berbagi kerjasama. Termasuk juga pandangan pluralisnya mengenai struktur kelas dan kekuasaan.

Pendekatan Dahrendorf terhadap konsep kekuasaan adalah anggapannya bahwa semua konflik harus melibatkan dua pihak dan hanya dua pihak tersebut yang bisa menyelesaikan. Ini berarti bahwa semua konflik kelas dan semua yang berhubungan dengan kekuatan dan kekuasaan meliputi "**dikotomi posisi**" antara dua pihak yang sama-sama memiliki kekuatan. Pandangan ini tampak pada realita sosial. Tidak sulit mencari contoh konsep tersebut. Dalam sejumlah sistem politik multi partai seperti di Inggris dan Kanada,

terbuktilah bahwa pertentangan yang terjadi hanya melibatkan dua pihak saja.

### **Institusionalisasi Konflik Kelas**

Institusionalisasi perjuangan kelas sangat krusial bila dikaitkan dengan ekonomi dan berbagai macam organ politik dan hukum di negara tersebut. Dalam lingkup ekonomi, paling baik ia digambarkan oleh penyebaran penawaran kolektif di mana manajemen dan tenaga kerja memaksakan keinginan mereka yang saling bertentangan dan pada akhirnya memecahkan pertentangan dengan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Dalam lingkup politik hukum, konflik yang diinstitutionalkan tampak pada penyelesaian melalui pengadilan hukum dan juga negoisasi legislasi dan keputusan politik melalui debat parlemen. Di sini, konflik dianggap sebagai kekuatan yang esensial untuk perubahan sosial.

### **Masa Depan Ketidaksetaraan Sosial**

Dahrendorf di sini sependapat dengan pandangan struktural fungsionalis mengenai ketidakadilan (ketidaksetaraan) yang mana terlihat memotivasi individu untuk mengejar kesempurnaan dalam masyarakat bebas. Pada akhirnya, ketakutan di masa depan adalah masyarakat totalitarian, masyarakat sosialis akan mendominasi. Sistem tersebut berupaya memaksakan keadilan melalui persamaan yang mana menahan kebebasan dan kemajuan.

Dengan demikian jelas, beberapa kesulitan dalam mengungkap konsep Dahrendorf mengenai kelas, kekuasaan dan konflik. Dalam banyak kasus, banyak klaimnya yang menyangkut ketidakadilan di masa modern yang mana harus direvisi bila melihat bukti-bukti terbaru. Namun demikian, analisis Dahrendorf tetap dicatat sebagai upaya untuk bergerak dari doktrin perspektif strukturalis fungsionalis dengan menggabungkan aspek-aspek dari Marx dan Weber untuk menciptakan orientasi alternatif berkaitan dengan ketidakadilan sosial.

### **Kuasa, Dominasi Dan Wewenang**

**Power** dalam definisi Weber adalah "kemungkinan individu, aktor dalam hubungan sosialnya berada dalam satu posisi yang mampu menyatakan kepentingannya tanpa mendapatkan tantangan". Definisi tersebut membawa beberapa konsekuensi pada sifat kekuasaan itu sendiri yang secara sporadis dan dapat berubah-ubah waktu. Sedangkan dominasi, dalam perspektif Weber, adalah bentuk khusus dari power. Dominasi adalah kondisi aktual power dalam konteks hubungan sosial ketika individu atau kelompok menerima posisi tertentu dalam kerangka struktural tertentu sebagai penerima perintah dari kelompok dominan. Dominasi menunjukkan adanya pola reguler yang dibangun untuk menunjukkan ketidaksetaraan berdasarkan power. Perbedaan antara power dan dominasi ini memungkinkan kita menganalisa praktik power sebagai suatu tindakan berkelanjutan dalam kerangka ketidaksetaraan sosial sebagai fenomena yang terstruktur. Jadi dominasi menjadikan power lebih bersifat tetap dan berkelanjutan dalam tataran praksis dari pada level definisi seperti pada awalnya.

Secara operasional, konsep dominasi dapat dihubungkan dengan kategorisasi struktur masyarakat yang telah disusun oleh Weber sebelumnya yaitu kelas sosial, kelompok status dan partai. Ketiga kategori dalam struktur masyarakat ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam praksis kekuasaan dalam realitas sosial. Dengan kata lain, anggota dari kelas sosial, kelompok status dan partai yang dominan dalam masyarakat akan dapat menyatakan kepentingan secara reguler dalam satu struktur masyarakat tertentu.

Konsep selanjutnya akan membahas alasan individu atau masyarakat yang berada pada level bawah mau menerima posisi mereka yang ter subordinasi. Dalam pemikiran

Weber, salah satu alasannya adalah adanya legitimasi yang menjadikan kelas- kelas atas mempunyai keabsahan untuk melakukan dominasi. Ada tiga macam legitimasi yang diajukan Weber untuk menjelaskan fenomena dominasi dalam masyarakat berdasarkan sumber-sumbernya. **Pertama**, legitimasi yang didapatkan dari kualitas individual seorang pemimpin yang acapkali disebut sebagai legitimasi kharismatik. Kualitas ini meliputi kepemimpinan, wibawa, popularitas. **Kedua**, adalah legitimasi yang didapatkan dari hukum atau peraturan yang telah ditetapkan yang disebut legal legitimacy. **Ketiga**, legitimasi yang didapatkan dari hak- hak tradisional untuk memimpin oleh individu atau kelompok tertentu yang dianggap lebih tinggi kedudukannya oleh masyarakat yang disebut traditional authority. Selain legitimasi, ada banyak faktor lain yang dapat menjadi alasan penerimaan atau kepatuhan individu dan masyarakat terhadap dominasi. Faktor tersebut antara lain kebiasaan yang tidak pernah dipikirkan lebih jauh, konvensi dan lain- lain. Subyek yang tersubordinasi dan menjadi obyek dominasi hampir tidak memiliki kesempatan untuk berubah karena adanya kepentingan individual tertentu, ketakutan terhadap penggunaan kekuatan fisik dan lain- lain.

Uraian di atas menunjukkan berbagai variasi faktor- faktor dominasi dan legitimisasi yang masih konsisten dengan pluralitas Weber. Elaborasi berbagai konsep legitimasi ini juga menunjukkan bukti pandangan awal Weber tentang kompleksitas dalam proses pembentukan realitas sosial sehingga perlu diperhitungkan dalam menganalisa fenomena sosial. Kompleksitas ini berguna dalam pengembangan konsep power sebagai konsep yang bersifat vital untuk memahami ketidak setaraan yang terjadi baik dalam level kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan ras, gender, etnisitas dan usia.

### **Rasionalisasi, Birokrasi Dan Administrasi**

Dalam menjelaskan konsep- konsep selanjutnya, Weber masih konsisten dengan faktor- faktor penyebab yang bersifat plural terhadap fenomena social inequality. Klaim ini berkaitan dengan tindakan sosial dalam perspektif weberian yang dianggap sepenuhnya sebagai sebuah kontestasi untuk mengejar kepentingan baik oleh individu atau kelompok. Persaingan ini menghasilkan ketidak setaraan dalam kekuatan yang pada akhirnya menghasilkan social inequality. Kontestasi dan persaingan inilah yang oleh Weber kemudian disebut sebagai politik yang menyatu dalam tindakan sosial. Jadi sebenarnya Weber menjelaskan term tindakan sosial dalam hal ini term politik politik yang telah jauh diperluas dalam ranah sosial.

### **Rasionalisasi**

Weber melihat kontinum perkembangan masyarakat terutama dalam term tindakan sosial dari waktu ke waktu menjadi semakin rasional. Artinya, tindakan sosial individu maupun kelompok semakin dipandu oleh berbagai macam alasan, diperhitungkan dengan matang dan rasional dalam rangka mengejar kepentingannya. Walaupun tentu saja, alasan- alasan non rasional, misalnya oleh emosi, hasrat dan lain- lain kerap kali muncul dalam masyarakat modern.

Bahasan Weber tentang tindakan rasional ini segera menjadi trend yang mendominasi pembahasan tentang tindakan rasionalisasi individu dan struktur organisasi masyarakat rasional. Hal ini terbukti dalam masyarakat kapitalis di mana kalkulasi dan pengejaran terhadap kepentingan pribadi menghasilkan kemajuan. Namun Weber tidak menganggap bahwa fenomena rasionalisasi ini hanya terjadi pada aspek ekonomi namun

juga terjadi aspek- aspek lain , seperti dalam agama misalnya,Weber melihat sebuah trend perkembangan sekularisasi ketika praktik agama semakin terstruktur, terorganisir dan terstandart. Ilustrasi ini digambarkan sebagai disenchantment of world.

Dengan cara yang sama pula, Weber melihat data perkembangan hukum dan pemerintahan. Bila di era sebelumnya hukum ditentukan oleh kekuasaan subyektif otoriter dan wilayah negara dikontrol dengan menggunakan kekuatan fisik, namun pada akhirnya ada perkembangan yang melahirkan tuntutan- tuntutan peran baru terhadap negara yang jauh lebih kompleks. Peran yang kompleks ini memerlukan suatu bentuk pengaturan yang lebih sistematis dan permanen serta memadukan kerjasama yang sinkron. Sistem tersebut menyangkut pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan implementasi kebijakan yang kemudian lebih dikenal dengan nama birokrasi.

### **Birokrasi**

Birokrasi adalah wilayah kunci dalam pertarungan antar kekuatan. Birokrasi modern sangat berbeda dengan bentuk terdahulu. Birokrasi modern lebih rasional dan obyektif dengan peraturan, wewenang, proses pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya secara hierarkhis. Dalam perspektif Weber, birokrasi layaknya "**mesin**" yang menyediakan perangkat rasional dan efektif untuk mengatur aktivitas sosial.

Bagi Weber, birokrasi sebenarnya merupakan perkembangan yang buruk bagi pengaturan masyarakat modern. Walaupun statement ini sebenarnya masih meragukan karena tanpa birokrasi, bagaimanapun mengatur kompleksitas masyarakat yang terus berkembang. Namun bagi Weber, pernyataan dia atas bukan sekedar penilaian baik dan buruk, tetapi adalah fakta. Sistem birokrasi modern dan rasional bagi Weber merupakan keburukan yang diperlukan. Perlu, karena ini adalah jalan satu- satunya yang praktis untuk mengejar masyarakat sekarang, buruk karena bagi Weber hal ini merupakan sangkar besi bagi individualitas dan mengancam demokrasi maupun sosialis. Perbedaan lain dari Marx adalah Weber melihat bahwa perjuangan dalam konteks sosial adalah inti dari dinamika masyarakat dan hal itu tidak hanya terjadi dalam ranah kelas. Ketidak setaraan adalah hasil dari kontestasi kepentingan secara terus menerus dalam setiap aspek masyarakat.

### **Marx Weber Dan Karl Marx**

Marx Weber adalah teoritis sosiologi yang hidup setelah era Karl Marx. Ia dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, Propinsi Thuringia, Jerman. Di mana pada saat yang sama Karl Marx yang berusia 46 tahun telah bermigrasi ke Inggris. Dalam konteks waktu ini, orang seringkali membandingkan pemikiran Weber dengan Marx. Sosiologi weberian dipandang sebagai salah satu alternatif pemikiran tentang kelas yang sebelumnya didominasi oleh arus pemikiran Marxian.

Walaupun mempunyai beberapa **concern** yang sama terhadap fenomena kelas dan struktur dalam masyarakat, namun Weber dan Marx menghasilkan dua arah pemikiran yang berbeda. Bila Marx lebih dikenali dengan karakter utama reduksionis dan deterministik dalam pemikirannya, Weber justru memperlihatkan kompleksitas dan pluralisme dalam memandang fenomena sosial di masyarakat. Namun, secara garis besar dalam keseluruhan tulisannya dapat dikatakan bahwa Marx Weber sangat dipengaruhi oleh Marx dalam karya-karyanya.

Weber mengembangkan analisis sosial yang jauh lebih luas dari Marx yang selalu berawal dan berakhir dalam dimensi ekonomi. Perhatian Weber terhadap faktor- faktor pembentuk struktur masyarakat di luar ekonomi meliputi nilai, religi, ide dan budaya yang

dianggapnya mempunyai peran yang sejajar dengan faktor ekonomi. Inilah titik tolak yang menjadi pembeda antara Marx dan Weber di mana Marx menganggap ekonomi adalah dasar utama bagi pembentukan struktur dalam masyarakat.

Perbedaan di antara dua pemikiran besar ini sangat mungkin disebabkan oleh dua hal. **Pertama**, adalah konteks sosial yang dihadapi keduanya sangat berbeda. Weber hidup setelah Marx ketika kapitalisme telah jauh berkembang dan menunjukkan eksistensi bentuk dan pola produksi yang telah berubah dengan bentuk awal yang dieksaminasi oleh Marx. Sedangkan yang **kedua**, bila Marx menjadikan Inggris khususnya dan Eropa Barat umumnya sebagai pijakan pengamatan realitas sosial, Weber justru mengalami fase penting perkembangan intelektualnya di Amerika yang struktur dan konstruksi masyarakatnya jauh berbeda dengan Inggris.

Politik berkeadilan sosial adalah sebuah langkah strategis dalam melakukan gerakan sosial menuju perubahan sosial masyarakat. Kenapa demikian? Faktor keadilan adalah sumber utama konflik, dan konflik inilah salah satu yang memicu gerakan sosial (politik) sebagai counter dari adanya penyimpangan sistem sosial sehingga fungsi- fungsi sosial tidak (kurang) berjalan secara norma. Normalisasinya ditempuh dengan cara melakukan gerakan sosial menuju perubahan sosial.

#### **Politik Berkeadilan Sosial**

Kemauan Politik (*Political will*) sebagai suatu syarat utama perubahan sosial lebih baik sangatlah menjadi harapan masyarakat khususnya kelas bawah yang memimpikan kemakmuran lebih baik, namun pengembangan sebuah sistem politik berkeadilan sosial tidaklah mudah. Bahwa para pemimpin negara- negara ini memiliki komitmen untuk memperjuangkan cita- cita Proklamasi 1945, barangkali tidak perlu diragukan lagi.

Kalau kita tahu bersama bahwa sejarah perkembangan perubahan sosial di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Indonesia itu sendiri. Dimulai oleh sebuah gerakan dalam pusat- pusat kerajaan di masa itu. Kemudian mengilhami adanya gerakan- gerakan berikutnya, sebagai perlawanan terhadap bentuk penjajahan (*kolonialisme*) baik dalam strategi frontal maupun dengan cara halus (lebih kooperatif). Pada masa- masa ini lahirlah banyak organisasi perjuangan seperti Boedi Utomo (1908) dipimpin Dr. Soetomo, NU (1928), Muhammadiyah (1928), dan lain- lain yang mempunyai ciri khas masing- masing dalam rangkai memperjuangkan perubahan sosial di kala itu. Selanjutnya, gerakan dalam rangka perubahan sosial, lebih kompleks dan luas, karena otoritas kekuasaan negara kita telah menjadi lebih maksimal. Bebas menentukan visi, misi dan programnya mau di bawa ke mana Indonesia ini. Yang menentukan adalah bangsa kita sendiri, tidak ada campur tangan kolonial. Tetapi, dalam perjalanan gerakan sosial ini, pasang surut sebuah gerakan sosial, tercoreng oleh peristiwa gerakan komunis (sosialis) yang mencari model tersendiri dalam mencari bentuk negara dan bangsa kita dalam rangka menentukan nasib dan perjuangannya. Sampai kemudian memasuki orde baru dengan karakteristik oritarianismenya dan militerismenya, melahirkan masa orde yang disebut Orde Reformasi. Di mana gerakan ini sanggup melumpuhkan pusat kekuasaan yang sangat tiranis saat itu. Tetapi kemudian, di dalam perjalanannya, perubahan sosial tidak kunjung terjadi disebabkan oleh keterpurukan segalan aspek kehidupan sosial oleh tidak sinerginya elit kekuasaan dengan masxa gerakan sosial.

Kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditopang oleh pondasi yang kuat untuk

mencapai tujuan negara itu sendiri. Pondasi yang kuat setelah falsafah dan dasar negara sebuah bangsa, yang lebih utama adalah penguatan kesadaran untuk melaksanakan semua aturan- aturan dasar sebuah bangsa yang telah menjadi kesepakatan bersama dengan penuh tanggung jawab dengan kata lain political will dari semua komponen penyelenggara negara dari mulai elit pemerintahannya, politiknya dan lebih- lebih kepada rakyatnya harus diberikan peluang sebesar- besarnya untuk ikut berpartisipasi sebesar- besarnya di dalam membangun bangsa dan negaranya itu sendiri. Lebih- lebih pada kesepakatan sebagai negara demokrasi ( tanda petik ” PANCA SILA ) sebagai sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa dan negara kita.

Pada konteks penguatan demokrasi dari perpesktif civil society tentu rakyat adalah tonggak utamanya sebagai penguat negara demokrasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Penguatan ini terletak kepada sejauh mana tingkat kesadaran dari sebuah bangsa untuk membangun bangsa dan negaranya itu sendiri. Ketika kesadaran ini telah pudar, maka pudarlah semua impian itu semua. Carut marutnya semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berawal dari carut marutnya tingkat kesadaran dari semua elemen berkebangsaan dan berkenegaraan itu. Sehingga membawa efek fatal bagi kehidupan masyarakatnya. Mengapa negara kita dalam kondisi sangat memprihatinkan sekarang ini? Mari kita kupas secara singkat dari kaca mata kesadaran sebuah bangsa. Civil Society menurut Antonio Gramsci, seorang filsuf politik kenamaan Italia, adalah upaya kelompok- kelompok sipil melakukan penguatan dan pengimbangan peran hegemonik negara ( Asrori S. Karni : Civil Society & Ummah ).

Kalau kita tahu bersama bahwa kesadaran sebuah bangsa adalah penguat *civil society*. Mengapa kesadaran sebuah bangsa menjadi carut marut ? bisa disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Pendidikan kebangsaan yang lemah sehingga melemahkan semangat nasionalisme.
2. Pendidikan Agama yang lemah bisa memicu kegagalan pembangunan sebuah bangsa, karena ini menyangkut aspek moralitas sebuah bangsa. Logikanya demikian, kenapa banyak terjadi maling di negara ini? Adalah disebabkan moralitas agama ( kesadaran ) yang lemah. Orang yang kesadaran moralitasnya lemah, kalau diberi amanat pasti kianat.
3. Pendidikan politik yang kurang, sehingga tidak ada etika berpolitik dan kesantunan politik. Ini menjadi fatal ketika bermain dalam percaturan politik praktis di mana semua mempunyai kepentingan dan misi yang berbeda.
4. Lebih- lebih kesadaran elit politik dan pemerintahan yang sangat lemah, akan berdampak langsung kepada kebijakan- kebijakan yang dihasilkan, akan merugikan rakyat ( masyarakat ). Secara riil, dapat saya gambarkan betapa kezaliman semakin tak berujung di negeri ini. Kita lihat saja, Kebijakan mengenai BBM yang ramai menuai protes, adalah buah kesadaran yang lemah dari para elit pemerintahan kita, menunjukkan kesadaran moral belum memasuki ruang- ruang pusat kekuasaan di negeri ini.

## KESIMPULAN

Dinamika politik yang berlangsung saat ini hanyalah dinamika kaum elit. Artinya apa ? ada komitmen bersama untuk bertujuan kemapanan bagi golongan- golongan tertentu mereka dengan mengesampingkan kepentingan tataran grasroot ( akar rumput ), di mana

mereka hanya dijadikan alat untuk menghantarkan kepada tujuan kaum elitis dengan mengesampingkan visi, misi dan tujuan yang sebenarnya.

Golongan ini menjadikan masyarakat lapisan bawah hanya sebagai obyek dan penghias proses demokrasi yang sedang dilangsungkan demi ambisi sebuah kekuasaan dari sebuah kesepakatan para elitis. Pada moment politik, mereka sibuk menawarkan janji- janji kepada rakyat, mulai dari pendidikan gratis, pelayanan kesehatan yang lebih murah, peningkatan pelayanan dan berbagai program lain yang tidak jelas logika rasionalnya. Dan bahkan disinyalir adanya bagi- bagi uang, sarung, indomie dan lain sebagainya. Tujuannya jelas, meraih simpati ( dukungan rakyat ) demi ambisi meraih kekuasaan. Jadi persis tugasnya hampir hanya mendulang suara dan menjualnya tanpa substansi kontribusi berkelanjutan yang jelas dan nyata. Fenomena ini tampak dengan adanya PILKADA yang selalu menimbulkan pro yang ekstrim dan kontra yang logis. Rakyat akan menjadi mayor issu yang harus ditarik simpatinya, dukungannya. Setelah itu mereka dilupakan begitu saja, tak dihiraukan suara ( aspirasi )-nya. Padahal mandat yang mereka peroleh pada hakekatnya berasal dari rakyat. Dengan kondisi demikian, maka implikasinya jelas :

1. Terjadi pemanasan suhu politik pada tataran akar rumput massa antara yang pro ekstrim dan kontra logis, tidak sedikit menimbulkan class action di antara mereka sebagai tumbal sebuah ambisi kekuasaan oleh konspirasi dan kesepakatan elitis dengan kedok wajah demokrasi. Ini tentu sangat berbahaya sekali bagi sebuah tegaknya demokrasi dan pembangunan politik sebuah bangsa.
2. Apatisme rakyat terhadap prosesi politik. Apatisme ini jika dibiarkan akan merusak sendi- sendi demokrasi. Dan yang paling nyata adalah semakin menurunnya tingkat partisipasi politik apabila dibiarkan terus- menerus. Hal ini sebuah tantangan dalam menciptakan legitimasi pemerintahan yang lebih baik.
3. Sikap apatis tersebut melahirkan pragmatisme politik di kalangan rakyat. Bagi mereka berpartisipasi atau tidak, diyakini tidak akan mempengaruhi perubahan kehidupannya. Keyakinan demikian tentu akan mengarah pada cara berpikir untung rugi, menjadi tidak rasional lagi dalam melihat calon pemimpin yang dapat menghantarkan kehidupan yang lebih baik. Partisipasi mereka lebih kepada kepentingan pragmatis, jangka pendek yakni imbalan materi. Demi uang 50 ribu rupiah, kesejahteraan mereka digadaikan selama lima tahun, ini sangatlah fatal karena " sebuah kebodohan paling bodoh " dan sangat merugikan masyarakat luas. Ironisnya, bagai gayung bersambut, umumnya elit politik yang bertarung maupun yang berkonspirasi ternyata memiliki paradigma pragmatis demikian juga. Demi tujuan politik, uang berhamburan tak masalah.
4. Dampak dari sebuah sistem yang rusak ini bagi sebuah birokrasi pemerintahan ( Sang Elitis ), tentu akan mencari " pulihan " ( bahasa Jawa : ijol ) yang tentu akan merugikan bagi masyarakat yang seharusnya dilayani kepentingannya, ditindaklanjuti secara nyata aspirasinya, tetapi malah dijadikan kuda tunggangan dan diperas " apa yang bisa diperas " . Sangat ironis sekali. Dengan kondisi ini, tentu secara rasional, Penguasa tidak akan berpihak kepada rakyatnya. Dalam konteks demokrasi, tentu ini akan mematikan aspirasi rakyat, kedaulatan rakyat dan tujuan rakyat.

Oleh karena itu, perlu dibangun sistem politik yang bersih, sehat, benar dan juga kultur politik yang demokratis yang dapat mendukung terciptanya iklim politik yang sehat, spektrum politik yang cerah serta keberhasilan pesta demokrasi di tingkat lokal dengan

meningkatkan kesadaran dan kedewasaan berpolitik yang tinggi yang dicerminkan oleh perilaku masyarakat dan penguasa ( pejabat negara ). Dengan demikian, demokrasi dapat berfungsi dengan baik yang implikasinya akan menjamin terpeliharanya stabilitas dan integrasi politik, baik dalam dimensi vertikal ( masyarakat – pemerintah ) maupun horisontal ( kelompok masyarakat ).

### **Potret Gerakan Politik Sekarang**

Telah disaksikan bersama, bangunan ” demokrasi orde baru ” yang begitu sentralistik diruntuhkan oleh ”gerakan reformasi ” yang mengusung semangat dan aspirasi perubahan. Sebutlah misalnya, perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Perubahan kebijakan sentralistik ke desentralistik untuk lebih mendinamisasikan kehidupan masyarakat lokal. Perubahan praktek pengelolaan pemerintahan dari inaccessible menjadi lebih transparan dan accountable. Perubahan orientasi pelayanan ke arah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sederetan perubahan yang dikehendaki, akan merupakan harapan hakiki dari sebuah manfaat demokrasi. Lihat saja, spirit dari gerakan ” reformasi ” adalah tuntutan akan terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Namun pasca orde baru malah memunculkan paradoks. Situasi kondisi sekarang dalam berbagai aspek memprihatinkan, rakyat semakin susah, katanya pejabat, ” berdasarkan data statistik tahun 2007 kemiskinan di Indonesia menurun ” ( maaf!, gundulmu iku sing menurun, menurun ke anak cucu, ya! ). Belum lagi elit lokal yang dianggap sebagai agen pembaharu, justru berurusan dengan masalah KKN ).

Apakah ini merupakan bagian dari gejala transisi? Sedangkan kita masih sulit melepaskan diri dari politik masa lalu, sementara keraguan akan gerakan reformasi terus membayang. Tak heran memang jika keraguan itu muncul. Mereka yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh masyarakat kemudian menjadi musuh masyarakat, karena ternyata memang tak tahan terhadap godaan uang ( suap ) dan permainan kekuasaan yang tidak jujur.

Harus diakui kita masih terselamatkan oleh munculnya kekuatan masyarakat sipil ( civil society ) yang relatif kuat. Ketika mekanisme kontrol kurang berjalan baik, civil society sebagai penyeimbang. Kekuatan inilah yang proaktif memperjuangkan dan mempraktekkan secara lugas kehidupan demokratis yang hakiki. Tapi ini belum berakhir, kita sedang terus menerus menata bangunan demokrasi yang idamkan.

### **Strategi Perwujudan Kedaulatan Rakyat**

Untuk menghindari perilaku yang menyimpang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka perlu diupayakan secara serius untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Demokrasi pada hakekatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan partisipasi rakyat seharusnya tidak berakhir pada bilik suara, tetapi lebih dari itu. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi pada setiap tahapan kehidupan politik. Dinamika kehidupan demokrasi secara esensial terletak pada partisipasi yang lebih luas dan menyeluruh dari rakyat. Oleh karenanya, ada beberapa strategi yang meskipun nampak sederhana namun sangat kompleks pada tataran operasionalnya. Strategi seperti ini harusnya menjadi agenda gerakan yang harus dikawal, utamanya oleh organ masyarakat yang independent dan memiliki idealisme kental. Misalnya tokoh- tokoh agama, mahasiswa, pers dan elemen lainnya yang memiliki tanggung jawab moral untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Strategi tgersebut antara lain :

1. Memperkuat kesadaran, masyarakat tentang demokrasi kerakyatan melalui pendidikan politik secara luas. Dengan melakukan pendidikan politik secara terus menerus, diharapkan akan tumbuhnya kesadaran kritis dan konstruktif yang menjadi instrumen penting bagi tegaknya demokrasi.
2. Revitalisasi nilai- nilai budaya dan aktualisasi kearifan lokal melalui penguatan peran dan fungsi elit lokal, dan mendorong terciptanya mekanisme dan agenda kerja yang jelas dan tegas, serta sosialisasi terhadap pentingnya penciptaan iklim yang kondusif dalam menyelenggarakan PILKADA demi mencegah konflik dalam berbagai bentuk dan skala.
3. Melakukan perubahan secara terus menerus terhadap pola rekrutment kepemimpinan daerah yang mengacu pada prinsip- prinsip demokrasi secara utuh.
4. Optimalisasi peran pers sebagai salah satu elemen penting dalam perwujudan demokrasi.
5. Memberikan perlindungan kepada rakyat yang lemah secara proporsional ( dengan berpedoman pada prinsip- prinsip pemberdayaan ) melalui pendekatan fasilitas, intermediasi serta asistensi secara terpadu dan menyeluruh. Masih banyak agenda dan model yang patut dilaksanakan selain di atas. Semoga bangsa khususnya daerah kita diberikan rahmat kekuatan untuk tetap memperjuangkan terwujudnya demokrasi yang tidak hanya pada tatanan prosedural melainkan sampai pada tatanan substansial. Kiranya momentum PILKADA langsung dapat dijadikan sebagai titik pijak untuk membangun kesadaran demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dan yang terutama adalah ketauladan seorang pemimpin dan penguasa (pejabat) Sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini secara utuh dan menyeluruh. Jangan menjadikan jauhnya jarak moralitas dan politik (kekuasaan) sebagai kultur politik yang rendah karena akan sangat berbahaya bagi kelangsungan eksistensi bangsa. Pertanyaannya adalah mengapa moral bangsa menjadi sedemikian parah? Tentu banyak teori dan analisis yang bisa dikemukakan agar equality bisa tercapai. Bagaimanapun tatanan konstruk, institusi, hukum dan sebagainya tidak bisa menjamin munculnya equality (rasa keadilan) kalau moral sebuah bangsa telah menjadi busuk, rasa malu bila hanya copot kothok di tengah pasar saja, sudah pasti keadilan tidak pernah ada atau akan berakhir kehancuran sebuah (tatanan) bangsa. Maka yang perlu digarap dalam pembangunan sekarang ini adalah " membangun moral (mental) bangsa ini". Karena dari moral yang rusak, semua usaha akan sia- sia. Jadi ketua RT, satu RT dikibulin. Jadi Camat, satu kecamatan diembat, Jadi Bupati, satu kabupaten akan ditipu. Sungguh fatal jadinya. Oleh karenanya, kita sangat rindu pada sosok figur pimpinan (penguasa) yang bersih, benar, berakhlak kharimah untuk menghantarkan kepada kesejahteraan rakyat lahir batin secara adil dan makmur sejahtera sentausa. Aamiin Allahuma Aamiin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, W. S. (2021). INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Pada Pelayanan Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- [2] Faturrahman, 2000, "Reorientasi Kebijakan Kepemimpinan " Yogyakarta : UGM Press
- [3] Majalah Tempo, Edisi September 2000.
- [4] Suwidi Tono, 2000 : " Mampukah Indonesia Bangkit " Jakarta : PT. Visi Komunikasi.
- [5] Mirsal, Robert, 2004 " Teori Pergerakan Sosial "Yogyakarta : Penerbit Resist Book.
- [6] Http : Bappenas.co. id./ MDG"s